



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 16 November 2023

Halaman: 2

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DPRD KOTA YOGYAKARTA
BADAN MUSYAWARAH DPRD KOTA YOGYAKARTA

Beririsan Tahapan Pemilu, Optimalisasi Agenda Persidangan

Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta bersama Forkompinda.
Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta memimpin jalannya sidang.
Sidang paripurna di gedung DPRD Kota Yogyakarta.

YOGYA (KR) - DPRD sebagai salah satu lembaga politik tidak bisa dilepaskan dari kepemiluan. Seiring tahapan Pemilu 2024 yang mulai beririsan dengan agenda persidangan di lembaga dewan, menuntut peran Badan Musyawarah agar tidak semakin berbenturan. Optimalisasi agenda persidangan menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan.

Sesuai tugasannya, Badan Musyawarah memegang kendali seluruh agenda permusyawaratan. Setiap agenda yang sudah diputuskan menjadi pertimbangan utama bagi alat perlengkapan lain. Bahkan jadwal yang sudah diputuskan tidak mampu diselesaikan, maka bisa berdampak sistemik. Hal ini karena hampir semua anggota dewan di DPRD Kota Yogyakarta bakal kembali berlaga sebagai kontestan calon wakil rakyat pada Pemilu 2024. Sementara akhir bulan ini masa kampanye sudah mulai digulirkan.

Berdasarkan pengalaman selama pemilu digelar, pada masa kampanye para kontestan disibukkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan kontestasi. Hal itu membuat kampanye merupakan hak yang diberikan bagi setiap kontestan serta jadi sarana yang sah dan tepat dalam menyapa masyarakat. Dengan demikian pada masa kampanye kegiatan persidangan harus benar-benar disesuaikan agar mampu mencapai kuorum.

Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta H Danang Rudyatmoko, mengaku dari aspek internal dewan pihaknya sudah menjadwalkan semua kegiatan DPRD harus selesai di bulan ini. "Paling tidak akhir November ini kami harapkan kegiatan seluruh alat perlengkapan dewan sudah bisa diselesaikan. Makanya kami atur agenda persidangan sampai sebelum masa kampanye bergilir," ungkapnya.

Sesuai agenda yang sudah dijadwalkan, dalam sepekan ini seluruh komisi yang ada di DPRD Kota Yogyakarta maraton menggelar rapat pembahasan bersama mitra kerja eksekutif. Terutama menyangkut rencana kegiatan anggaran (RKA) tahun 2024 yang sudah dijabarkan hingga tingkat teknis. Danang menambahkan, jika pekan ini masih ada pembahasan yang belum mampu diselesaikan, masih ada waktu pada pekan depan. Akan tetapi maksimal pada 23 November 2023 sudah tidak ada kebijakan yang belum dituntaskan. Pasalnya pada 24 November 2023 dijadwalkan sidang paripurna untuk persetujuan bersama RAPBD 2024 serta penetapan Program Pembangunan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024.

Oleh karena itu ketika masuk masa kampanye Pemilu 2024 yang akan dimulai pada 28 November 2023, tidak ada lagi agenda persidangan yang sifatnya mendesak. Apalagi pada akhir tahun anggaran sudah tidak ada kegiatan karena memasuki tutup buku. "Kami sangat menghargai agenda Pemilu 2024 yang masa kampanyenya hanya 75 hari. Sehingga waktu tersisa ini tinggal menyelesaikan masalah internal saja," tandasnya.

Badan Musyawarah pada sisa waktu persidangan efektif kali ini juga tidak lepas dari proses monitoring kegiatan alat perlengkapan dewan. Tiga pimpinan Badan Musyawarah yang juga ex officio Pimpinan Dewan saling berbagi tugas dalam melakukan pengawasan. Sehingga jika ada salah satu alat perlengkapan yang mengalami deadlock dengan tim eksekutif, Badan Musyawarah bisa langsung mengambil peran. Seperti Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang pekan lalu mengalami jalan buntu, pekan ini kembali dijadwalkan pembahasan lanjutan bersama tim eksekutif tanpa mengganggu agenda persidangan yang dilakukan oleh alat perlengkapan lainnya.

Selain memastikan seluruh agenda persidangan di akhir tahun ini mampu diselesaikan sesuai jadwal, Badan Musyawarah juga sudah merancang kegiatan awal tahun 2024. Hal ini karena masih beririsan dengan agenda kampanye namun rencana kerja dan anggaran tahun 2025 juga harus mulai dibahas sejak awal tahun 2024. Diawali dengan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan, musrenbang tematik maupun pokok pikiran dewan. "Untuk rencana kerja kita diberi waktu sampai Februari. Padahal pada bulan-bulan itu kan tahapan Pemilu 2024 mencapai puncak-puncaknya. Mulai dari pemungutan suara kemudian rekapitulasi dari tingkat TPS hingga kota. Ini harus kami rencanakan betul agar jangan sampai kepelembuan Pemilu 2024 maupun penyelenggaraan pemerintahan tersendat," urainya.

Oleh karena itu, Badan Musyawarah mengambil kesepakatan untuk menarik maju agenda kedewanan pada awal tahun depan. Salah satunya agenda reses awal tahun bakal digelar Januari atau maksimal awal Februari 2024. Masa reses yang berlangsung selama enam hari tersebut menjadi sangat krusial dalam menjangkau aspirasi konstituen. Usulan-usulan yang disampaikan akan direkam dengan baik oleh setiap anggota dewan yang mengambil jatah reses, kemudian diakomodir dalam pokok pikiran dewan.

Seiring dengan itu pula, musrenbang tingkat kelurahan dan musrenbang tematik turut digulirkan. Harapannya ada keterpaduan antara hasil reses dengan hasil musrenbang. Dengan begitu akan memudahkan dalam proses penyusunan pra rencana kerja.

Tugas dan wewenang Badan Musyawarah juga telah dirinci dalam tata tertib dewan. Selain mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan lima tahunan dari seluruh alat perlengkapan, agenda DPRD dalam satu tahun masa sidang juga ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Begitu pula perkiraan waktu penyelesaian setiap masalah serta jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah. Khusus waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah sudah ditetapkan maksimal tiga bulan setelah panitia khusus dibentuk. Tenggat waktu itu telah disepakati bersama dengan Bapemperda yang memiliki kewenangan terhadap Propemperda dalam satu tahun masa sidang.

Keputusan Badan Musyawarah bahkan bersifat mengikat. Hal ini karena perubahan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat dilakukan melalui rapat paripurna. "Setiap fraksi memiliki wakil di Badan Musyawarah. Sehingga sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah, setiap anggota selalu berkonsultasi dengan fraksi terlebih dahulu," imbuh Danang.

Wakil Ketua I Badan Musyawarah HM Fursan, mengungkapkan kunci utama agar semua agenda tidak meleset dari jadwal ialah komitmen untuk saling berkoordinasi. Seperti memasuki akhir tahun masa sidang pada tahun ini pihaknya turut mengawal capaian kinerja dan program dari masing-masing alat perlengkapan. Salah satunya realisasi pembahasan rancangan peraturan daerah yang dipastikan tuntas 100 persen. Hasil dari kinerja itu pun akan mempengaruhi rencana kerja legislasi pada tahun selanjutnya.

Senada disampaikan Wakil Ketua II Badan Musyawarah Dhiyan Novitasari. Menurutny, permusyawaratan merupakan model yang melekat dalam ketugasan dewan. Pasalnya, dalam permusyawaratan tersebut terjadi pertukaran pendapat dari berbagai pihak terhadap suatu permasalahan guna diputuskan kebijakan terbaik sesuai kemaslahatan bersama dan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pihaknya dalam menyusun agenda permusyawaratan juga mempertimbangkan banyak hal. Terhadap kegiatan yang dijalankan, Badan Musyawarah melakukan krocek secara berkala mengenai capaian kinerja.

"Kita saling koordinasi. Baik dengan alat perlengkapan lain maupun unsur yang ada di eseksekretariat mulai bagian perundangan, persidangan, umum, keuangan dan lainnya. Sehingga kalau ada persoalan yang bisa berdampak pada agenda lain, bisa segera dicarikan solusinya," paparnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005